



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 486 -Huk/2024

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2024

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat melalui strategi pengintegrasian pengarusutamaan gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan dan program pembangunan di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4004);
8. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39 Tahun 2008);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 1).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
2. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karawang Nomor : 400.2.1/1052/DPPA tanggal 23 Oktober 2024 perihal Draf Keputusan Bupati Karawang Tentang Rencana Aksi Daerah Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2024;
KEDUA : Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam Keputusan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 31 Oktober 2024



Pjs. BUPATI KARAWANG,

TEPPY W DHARMAWAN

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2024

| PRASYARAT | INDIKATOR | | PEMETAAN DAN RENCANA AKSI | | | | | PENANGGUNG JAWAB |
|-------------|--|------------------------------|---|--|-----------------------------------|--|--|------------------|
| | INDIKATOR | UKURAN | KONDISI SAAT INI | MASALAH | RENCANA TINDAK LANJUT | | | |
| | | | | | 2024 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 |
| 1. Komitmen | 1.1. Kebijakan Daerah Tentang PUG Daerah | Perda PUG di Daerah | Ada Perda No. 1 Tahun 2020 Tentang PUG | Masyarakat masih belum memahami tentang PUG | Sosialisasi | | | DP3A |
| | | | Ada Perda No. 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan | Masyarakat masih kurang pemahaman mengenai pemberdayaan dan perlindungan perempuan | Implementasi | | | DP3A |
| | | | Ada Perda No. 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak | Masyarakat masih kurang pemahaman tentang hak dan perlindungan anak | Implementasi | | | DP3A |
| | | | Ada Perda No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan dan Pencegahan Korban Perdagangan Orang | Masih ada perempuan dan anak menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) | Sosialisasi dan pemberian layanan | | | DP3A |
| | | Perbup Tentang PUG di Daerah | Ada Perbup No. 66 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan PPRG | Belum optimalnya pelaksanaan PPRG | Sosialisasi dan Pelatihan PPRG | | | DP3A |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|------------------------------|--|--|--|--|--------------------------------|
| | | | Ada Perbup No. 78 Tahun 2012 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang | Belum maksimal gugus tugas dalam sosialisasi dan Pendampingan | Sosialisasi dan pendampingan | | | | | DP3A |
| | | | Ada Kepbup No. 407.05/Kep.210-Huk/2018 Tentang Pokja PUG | Masih belum optimalnya kinerja Pokja untuk percepatan pelaksanaan PUG | Rakor Pokja PUG | | | | | Bappeda DP3A dan Semua OPD |
| | | | Ada Kepbup No. 476/Kep.475-Huk/2020 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Driver PUG | Masih belum maksimal Tupoksi Driver | Rakor Driver PUG | | | | | Bappeda DP3A Inspektorat BPKAD |
| | | | Ada Kepbup No. 800/Kep.535-Huk/2018 Tentang Forum Komunikasi Wilayah Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Daerah Provinsi Jawa Barat Periode Tahun 2018-2023 (Puspa) | Kurangnya partisipasi serta pemahaman organisasi dalam pemberdayaan perempuan | Rakor Puspa | | | | | DP3A |
| | | | Tidak ada Kepbup Tentang Forum Klinik PPRG | Belum ada | Belum ada | | | | | DP3A |

| | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---|--|------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | 1.2. Kebijakan pelaksanaan PUG dari Kepala Daerah ke setiap OPD | Instruksi Sekda Tentang PPRG | Ada Surat Edaran Bupati No. 910/829/DP3A/2018 Tentang ARG | Belum semua OPD | Proses pengkajian | | | | | BAPPEDA |
| | | | Ada Surat Edaran Bupati No. 050/5328/DP3A/2017 Tentang Pembuatan Ruang Laktasi | Belum semua instansi dan pelayanan publik lainnya memiliki ruang laktasi | ada | | | | | DP3A |
| | | | Ada Keputusan Sekda No. 100/Kep.13-Huk/2018 Tentang Forum Data Terpilah Gender Kabupaten Karawang | Belum Semua OPD tersedia Data Terpilah Gender | Sosialisasi dan koordinasi | | | | | DP3A |
| | | | Ada Surat Edaran Sekda No. 050/4615/DP3A/2018 Tentang Pelaksanaan PUG di Lingkup OPD | Masih kurangnya percepatan pelaksanaan PUG | Sosialisasi | | | | | DP3A |
| | | | Ada Surat Sekda No. 800/1039/DP3A/2018 Tentang Pembentukan Focal Point PUG | Focal Point yang selalu berubah atau berganti di setiap OPD | 30 OPD telah membentuk Focal Point | | | | | OPD Perusahaan Perguruan Tinggi Masyarakat |
| | 1.3. Rencana pencapaian PUG di masing-masing OPD | Surat Kepala Perangkat Daerah dalam percepatan PUG | Tentang Pembentukan Focal Point pada OPD | Focal Point selalu berganti karena mutasi pegawai | Rakor | | | | | OPD Kabupaten Karawang |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|--|--|---|--|--|--|------------------------|
| | | | Tentang PPPRG berbasis GAP dan GBS pada OPD | Belum semua OPD menuangkan GAP dan GBS dalam Penganggaran | Bimbingan teknis | | | | OPD Kabupaten Karawang |
| | | | Tentang penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender serta ramah anak di tempat kerja | Belum semua OPD dapat memfasilitasi sarana yang responsif gender | Belum seluruh OPD, perusahaan padat karya dan rumah sakit | | | | OPD Kabupaten Karawang |
| | | | Tentang penyediaan Data Terpilah Gender dan Data Sektoral | Belum semua sektor tersedia Data Terpilah Gender | 30 OPD tersedia Data Terpilah Gender | | | | OPD Kabupaten Karawang |
| 2.Kebijakan | 2.1. Dokumen Perencanaan (Renstra, Renja) | RPJMD dan Renstra DP3A yang memuat : | Tentang isu strategis, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, program pembangunan, indikator kinerja dan target | RPJMD dan Renstra DP3A sudah ada | RPJMD dan Renstra DP3A sudah ada | | | | OPD Kabupaten Karawang |
| | | Adanya dasar hukum PUG | Ada Perda No. 1 Tahun 2020 Tentang PUG | Ada Perda No. 2 Tahun 2017 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan | Ada | | | | DP3A |
| | | Renstra DP3A memuat : visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan | Ada Renstra Perangkat Daerah | PUG sudah tertuang dalam Renstra DP3A | Ada | | | | DP3A |
| | | Adanya data terpilah; | Data Terpilah Gender | DP3A belum memiliki data terpilah semua sektor dan diperbaharui setiap tahun | Ada | | | | DP3A |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|--|---|---|------------|--|--|--|--|--------------|
| | | Visi dan misi; | Sudah tercantum | Sudah tercantum | Ada | | | | | DP3A/BAPPEDA |
| | | Program dan kegiatan yang mendukung PUG; | Program kegiatan PUG sudah tercantum dalam DPA | Sudah tercantum | Ada | | | | | DP3A |
| | | Adanya indikator gender | Sudah tercantum dalam Renstra DP3A | Sudah tercantum | Ada | | | | | DP3A |
| | 2.2. Renstra OPD | Persentase Renstra OPD yang memuat : | PUG sudah tercantum dalam RPJMD | OPD otomatis tercantum | 100 % | | | | | OPD |
| | | Adanya dasar hukum PUG; | Sudah tercantum | Sudah tercantum | Ada | | | | | DP3A |
| | | Adanya data terpilah; | Baru 20 OPD yang memiliki data terpilah | OPD lainnya sedang proses | 10 OPD | | | | | OPD |
| | 2.3. Dokumen Anggaran (RKA OPD, ARG, GBS) | Komitmen PUG sudah diakomodasikan dalam KUA/PPAS | Ada Dalam KUA/PPAS OPD | Sudah tercantum | 30 OPD | | | | | BPKAD/OPD |
| 3.Kelembagaan | 3.1. Unit organisasi yang menangani PUG di daerah | Es 3, Es 2, Non Es | Ada Es. II : 1 orang Es. III : 1 orang Es.IV : 1 orang Non Es - | DP3A | Ada | | | | | DP3A |
| | 3.2. Adanya Pokja PUG di daerah; | SK tentang POKJA dari Kepala Bupati | Ada 407.05/Kep.210-Huk/2018 Tentang Pokja PUG | Sudah terbentuk Pokja PUG | Ada | | | | | DP3A |
| | 3.3. Focal Point di masing-masing OPD; | Jumlah OPD yang mempunyai Surat Penunjukan Focal Point | 30 OPD yang telah membentuk Focal Point | Perlu dikoordinasikan kembali dengan OPD yang belum mengirimkan | Koordinasi | | | | | DP3A / OPD |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|---|---|--------------------------------------|--|--|--|--------------------|
| | | dari Kepala OPD | | | | | | | |
| | | Persentase OPD yang mempunyai Focal Point | Yang sudah membentuk Focal Point 100% | Perlu dikoordinasikan kembali dengan OPD yang belum mengirimkan | Koordinasi | | | | DP3A / OPD |
| | 3.4. Adanya rencana aksi pelaksanaan PUG di daerah | Perbup Tentang RAD-PUG | Sudah ada Perbup No. 44 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Daerah PUG Tahun 2017 - 2021 | Perubahan Perbup Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG untuk Tahun 2022 - 2026 | Ada | | | | DP3A / BAPPEDA |
| 4.Sumber Daya | 4.1. Perencana yang mahir | Jumlah perencana OPD yang mendapatkan sertifikat | Ada 30 orang Perencana dari 30 OPD se Kabupaten Karawang | Belum semua perencana mahir dalam PPRG | Peningkatan kapasitas | | | | BAPPEDA DP3A |
| | 4.2 Auditor yang mempunyai sertifikat | Jumlah auditor yang mendapat sertifikat | Ada 2 orang auditor yang mempunyai sertifikat | Belum semua auditor mahir dalam pengawasan PPRG | Peningkatan Kapasitas | | | | DP3A Inspektorat |
| | 4.3. Anggaran fasilitasi PUG di daerah | Jumlah alokasi anggaran fasilitasi PUG | Ada program kegiatan untuk fasilitasi PUG pada DP3A | Fasilitasi PUG | Perencanaan anggaran PUG | | | | BAPPEDA BPKAD DP3A |
| | 4.4. Jumlah Fasilitator | Jumlah fasilitator yang mendapat sertifikat | Ada Klinik PPRG yang melibatkan akademisi di bawah naungan provinsi | Masih perlu advokasi, koordinasi dan penguatan kapasitas | Koordinasi dan Penguatan kapasitas | | | | DP3A Akademisi |
| | | | | | | | | | |
| | 4.5. Jumlah Gender Champion | Jumlah orang yang memenuhi kriteria | Sudah ada 4 tokoh gender Champion, He For She bidang politik, hukum dan sosial 3 tokoh laki-laki dan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) siap | Perlu adanya peningkatan kapasitas tokoh Gender Champion, He For She dan SIAP serta sinergitas program untuk percepatan pelaksanaan PUG | Koordinasi dan peningkatan kapasitas | | | | DP3A |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|---|-------------------------|--|--|--|----------------|
| | | | kepemimpinan, hukum, sehat dan pintar | | | | | | |
| | | | Masih minim tokoh Gender Champion, He For She dan SIAP sebagai motivator pelaksanaan PUG | Perlu penambahan tokoh Gender Champion, He For She dan SIAP sebagai motivator pelaksanaan PUG | 3 orang | | | | DP3A |
| 5. Data dan sistem informasi | 5.1. Pengelola data yang mahir | Jumlah pengelola data OPD yang mendapat sertifikat | Ada 30 orang Focal Point OPD 1 orang operator (SIGA) | Banyaknya pergantian petugas pengelola data | Peningkatan Kapasitas | | | | DP3A |
| | 5.2. Statistik gender/Profil gender | Adanya profil gender | Tidak ada | proses penyusunan Tahun 2024 | tidak ada | | | | DP3A |
| | | Adanya buku/data Karawang dalam Angka | Data Sektoral | Sudah ada | Ada | | | | BPS Diskominfo |
| | 5.3. Data terpilah di masing-masing OPD; | Ada 30 OPD yang sudah melaporkan data terpilah | ada | Sudah diinput | Proses | | | | OPD |
| | 5.4. Mekanisme/sistem informasi; | Ada mekanisme/sistem informasi | Ada SIGA | perbaikan konten data | Peningkatan pengelolaan | | | | DP3A |
| 6. Metode /Tool | 6.1. Pedoman Teknis pelaksanaan PUG | Pedoman Teknis pelaksanaan PPRG; | Ada | Sudah disosialisasikan | Sudah disosialisasikan | | | | DP3A |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|--|---------------------|--|--|--|--|-------------|
| | 6.2. Modul PUG/PPRG daerah | Modul pelatihan PPRG | Ada Modul Panduan Pelatihan PUG | Belum semua OPD mendapatkan modul pelatihan | Ada | | | | | DP3A |
| | 6.3. Metode analisis gender yang digunakan daerah | Pedoman teknis analisis gender GAP di daerah | Ada Leaflet | Perlu diperbaharui sesuai dengan perkembangan | Ada | | | | | DP3A |
| | 6.4. Pedoman audit yang responsif gender | Panduan/manual pengawasan PPRG di daerah; | Ada Surat Keputusan Inspektorat No. 700/Kep.32/Inspt/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan PPRG | OPD memerlukan panduan sebagai petunjuk dalam pengawasan | Ada | | | | | Inspektorat |
| | | Ada buku-buku terbitan yang berkaitan dgn PUG di daerah itu | Tidak ada yang baru | OPD perlu untuk dijadikan bahan informasi | Menerbitkan | | | | | DP3A |
| | | Jumlah jenis bahan KIE untuk promosi PUG | Ada Leaflet PUG | Belum ada yang baru | Menerbitkan | | | | | DP3A |
| 7.Peran serta masyarakat dan jejaring | Jumlah LM, PSW/G dan dunia usaha yang terlibat dalam kegiatan gender atau kegiatan yang responsif gender | LM/PSW/Dunia usaha yang terlibat dalam POKJA PUG; | LM : PUSPA, IKIAD. KPPI, DWP dan semua Organisasi wanita yang tergabung dalam GOW, PSW : UNSIKA, UBP, STIKES, STMIK HORIZON, Dunia Usaha : PDAM, BJB, Pupuk Kujang, P&G, Nestle, Pindo Deli, Changshin Indonesia | Masih perlu peningkatan/perlu perluasan jejaring | penambahan jejaring | | | | | DP3A |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------|--|---|---|---------------------------|--|--|--|--|-------------------|
| 7.Partisipasi Masyarakat/Kerjasama | | Jumlah LM/PSW/G yang terlibat dalam melakukan penelitian/kajian terhadap Pelaksanaan PUG; | Ada UNSIKA, UBP, STIKES, STMIK HORIZON | Masih terbatasnya pelibatan LM dan PSW/G dalam penyusunan Perda PUG | Koordinasi dan Sinergitas | | | | | DPPPA |
| | | Jumlah LM/PSW/ dunia usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan PUG di daerah | LM : PUSPA, IKIAD. KPPI, DWP dan semua Organisasi wanita yang tergabung dalam GOW, PSW : UNSIKA, UBP, STIKES, STMIK HORIZON, Dunia Usaha: PDAM, BJB, Pupuk Kujang, P&G, Nestle, Pindo Deli, Changshin Indonesia | Perlu dilibatkan dalam Rakor dan pendampingan | Rakor dan Pendampingan | | | | | DP3AKB |
| | | Jumlah LM/PSW/dunia usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan yang responsif gender di daerah | LM : PUSPA, IKIAD. KPPI, DWP dan semua Organisasi wanita yang tergabung dalam GOW, PSW : UNSIKA, UBP, STIKES, STMIK HORIZON, Dunia Usaha: PDAM, BJB, Pupuk Kujang, P&G, Nestle, Pindo Deli, Changshin Indonesia | Perlu dilibatkan dalam Rakor | Rakor | | | | | DPPPA |
| II.PELAKSANAAN | | | | | | | | | | |
| 1.Kebijakan, program dan | 1.1. Kebijakan | 1.3. Jumlah kegiatan | Seluruh OPD dan kecamatan sudah | sudah 30 OPD dan 30 kecamatan yang telah | 60 OPD dan Kecamatan | | | | | OPD dan Kecamatan |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|--|--|---|----------------------|--|--|--|--------------------------|
| kegiatan yang Responsif Gender | Daerah yang responsif gender | pembangunan daerah yang responsif gender yang dilaksanakan | merencanakan yang responsif gender | mengirimkan anggaran yang responsif gender pada Tahun 2024 | | | | | |
| | 1.2. Program pembangunan daerah yang responsif gender | Jumlah program yang responsif gender yang ditetapkan dalam 2 tahun terakhir | Seluruh OPD dan kecamatan sudah merencanakan yang responsif gender | Sudah 30 OPD dan 30 Kecamatan yang telah mengirimkan anggaran yang responsif gender pada Tahun 2024 | 60 OPD dan Kecamatan | | | | OPD dan Kecamatan |
| | | • Persentase terhadap semua program | Seluruh OPD dan kecamatan sudah merencanakan yang responsif gender | Masih perlu koordinasi berkelanjutan dengan OPD dan kecamatan | 100% | | | | OPD dan Kecamatan |
| | 1.3. Jumlah kegiatan pembangunan daerah yang responsif gender yang dilaksanakan | •Jumlah program yang responsif gender yang ditetapkan dalam 2 tahun terakhir | Seluruh OPD dan kecamatan sudah merencanakan yang responsif gender | Masih perlu koordinasi berkelanjutan dengan OPD dan kecamatan | 60 OPD dan Kecamatan | | | | OPD dan Kecamatan |
| | | Persentase terhadap semua program | Seluruh OPD dan kecamatan sudah merencanakan yang responsif gender | Masih perlu koordinasi berkelanjutan dengan OPD dan kecamatan | 100% | | | | OPD dan Kecamatan |
| 2. Kelembagaan | Jumlah Kecamatan dan OPD difasilitasi | Jumlah dan persentase Kab/Kota | Ada 30 Kecamatan dan 30 OPD mendapat fasilitasi | Minimnya anggaran dalam pelaksanaan PUG | 100 % | | | | BAPPEDA BPKAD DP3A |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|--|---|--|---|--|--|--|--------------------|
| | dengan anggaran APBD II | yang difasilitasi | | | | | | | |
| | Jumlah daerah lain yang belajar PUG di Kabupaten Karawang | Jumlah provinsi dan kabupaten/kota | Adanya kunjungan dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota | Untuk sharing pembelajaran tentang PUG dan pemberdayaan perempuan dan anak | ada | | | | DP3A |
| | Jumlah Unit | Jumlah UPT PPA | Belum ada Unit UPT PPA | Masih perlu persiapan dan pengkajian untuk perubahan dari P2TP2A menjadi UPT PPA | Proses persiapan dan pengkajian | | | | DP3A |
| | Kantor OPD yang mempunyai ruang Day Care/Laktasi | Jumlah Kantor yang mempunyai Ruang Day Care/Laktasi | ada pendataan terkait kantor yang memiliki ruang day care/laktasi | adanya pendataan untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak | Pendataan lebih lanjut dan Visitasi Uji petik RRG | | | | DP3A |
| 3. Anggaran | ARG | •Jumlah anggaran Pemda yang Responsif gender | 30 OPD dan 30 kecamatan menyusun ARG | Belum semua anggaran yang responsif gender dilaporkan | Pendataan lebih lanjut Visitasi Uji petik ARG | | | | Bappeda/DP3A/BPKAD |
| | | •Persen ARG terhadap seluruh anggaran | 30 OPD dan 30 kecamatan menyusun Anggaran Responsif gender | Belum semua anggaran yang responsif gender dilaporkan | 80% | | | | Bappeda/DP3A/BPKAD |
| | | Jumlah program/kegiatan yang mengikuti LM/PT/dunia usaha | Ada sekitar 10 kegiatan | telah dilakukan pelibatan LM/PT/Dunia usaha dalam berbagai program dan kegiatan | Pendataan lebih lanjut Visitasi Uji petik ARaG | | | | Bappeda/DP3A/BPKAD |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|-------|
| 4. Peran serta Masyarakat | Lembaga Masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang responsif gender | Lembaga Masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang responsif gender | LM : PUSPA, IKIAD. KPPI, DWP dan semua Organisasi wanita yang tergabung dalam GOW, PSW : UNSIKA, UBP, STIKES, STMIK HORIZON, Dunia Usaha: PDAM, BJB, Pupuk Kujang, P&G, Nestle, Pindo Deli, Changshin Indonesia | Masih kurang jejaring untuk melaksanakan kerjasama | Penguatan kapasitas serta meningkatkan kerjasama | | | | | DPPPA |
|---------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|-------|


 Djs. BUPATI KARAWANG,
 TERPAW DHARMAWAN